KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bos Bappebti Bicara soal Aset Kripto yang Akan Diawasi OJK	
	Media Name : kumparan.com	**Journalist** : -
	Publish Date : 22 July 2023	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	**Topic** : Bursa Kripto

Beranda > Bisnis

Bos Bappebti Bicara soal Aset Kripto yang Akan Diawasi OJK

kumparanBISNIS

22 Juli 2023 13:43 · waktu baca 2 menit

PLT Ketua Bappebti Didid Noordiatmoko memberikan sambutan pada acara penandatanganan PKS Bappebti-Aspakrindo, Kantor Bappebti, Kamis (5/1/2023). Foto: Dok. Bappebti

Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan rencana pengurusan aset kripto usai UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disahkan DPR.

Didid mengatakan, setelah rancangan peraturan pemerintah (RPP) disiapkan, maka kelembagaan aset kripto akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paripurna DPR juga sudah mengesahkan Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Dewan Komisioner OJK.

"Saya menunggu ngobrol dengan Hasan Fawzi. Sesuai UU PPSK 2 tahun sejak ditetapkan, paling lambat (aset kripto) pindah ke OJK Januari 2025," kata Didid saat wawancara dengan **kumparan**, Sabtu (22/7).

Didid menyebut, Bappebti menyerahkan ekosistem aset kripto kepada OJK. Ia berharap, OJK bisa mempertahankan pengelola bursa komoditi aset kripto yang ditunjuk Bappebti yakni PT Bursa Komoditi Nusantara.

"Soal nanti di sana seperti apa, harapannya tetap *sustain*. Dan saya yakin tentu juga ada aturan *upgrade* dari aturan Bappebti, bukan berarti aturan Bappebti jelek," tuturnya.

Didid memprediksi akan ada penyesuaian kebijakan seiring regulasi aset kripto baru di tangan OJK tahun 2025, sehingga ekosistem aset kripto nantinya mengikuti penyesuaian kebijakan di OJK.

Sebelumnya, saat *fit and proper test* dengan Komisi XI DPR RI, Hasan Fawzi, menawarkan strategi inovasi menuju era baru keuangan digital di Indonesia. Ia akan fokus pada aturan yang mengedepankan perlindungan konsumen, integritas pasar, hingga mitigasi risiko sistemik.

"Untuk dapat mencapai visi, misi dan tujuan strategis OJK di sektor yang baru ini , saya mengajukan 7 strategi beserta agenda program prioritas yang perlu dijalankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan 2023-2028 dengan nama INOVASI," kata Hasan saat menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI, Senin (10/7).

Ekonomi Digital · Bappebti · OJK · Aset Kripto · Keuangan · Kripto · Bursa Kripto

Informasi Redaksi · Laporkan tulisan